



## EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN BLANAKAN)

**Tony Pathony<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[topath12dos@gmail.com](mailto:topath12dos@gmail.com)

**Kusman Yuhana<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[yuhanakusman.yk67@gmail.com](mailto:yuhanakusman.yk67@gmail.com)

**Iwan Henri Kusnadi<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[iwanhenri01@gmail.com](mailto:iwanhenri01@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan dalam menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk pertauran-peraturan sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya program pemberdayaan nelayan serta masih terdapat Nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya, belum semua nelayan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

**Kata Kunci:** Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan

### **Abstract**

*Research on the effectiveness of the fishermen empowerment Programs aims to find out how the effectiveness of the fishermen empowerment program in Subang district fisheries service.*



*The location that was made the object of research was the fishermen empowerment program in Blanakan Subang district, subang Regency. This research discusses matters relating to the effectiveness of fishermen empowerment programs in carrying out programs to improve the welfare of fishermen. In this study the authors used descriptive qualitative research methods through observation an interviews, literature study and documentation. Data collection methods are obtained directly and documents are obtained in the form of regulations while managing data by analyzing the results of interview and observations. The results showed that the effectiveness of the fishermen empowerment program in Subang district fisheries service was not yet effective based on the theory of program effectiveness measurement according to Sutrisno. This can be seen from the lack of awareness of fishermen about the importance of fishermen empowerment programs, there are still fishermen who do not understand their rights and obligation and not all fishermen get help from the government and the government socialization has not been maximized.*

**Keywords:** *effectiveness of fishermen empowerment programs*

## **Pendahuluan**

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Efektivitas merupakan fungsi dari sebuah pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk setiap masyarakatnya. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi peraturan secara jelas, ini sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pelayanan publik setiap organisasi mempunyai tujuan, baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang yang direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara efektif bilamana penggunaan sumber daya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar. Suatu program atau kegiatan dalam organisasi akan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dalam suatu program atau kegiatan diperlukan pengukuran efektif atau tidaknya program tersebut, untuk melihat sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditentukan bisa tercapai. Efektif atau tidaknya suatu program sangat ditentukan oleh adanya faktor dalam pemahamn diri dari pelaksana dan penerima dengan penuh kesadaran dari lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran.

Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Dikemukakan Sondang dalam Othenk (2008:4) Efektivitas

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Robbins dan Caulter (2010:8), Efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasarnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dalam pelaksanaan program dibutuhkan keefektivitasan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sesuai dengan peraturan kebijakan. Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Efektivitas program tentunya ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Jadi dengan demikian berdasarkan ukuran efektivitas diatas dapat diketahui bahwa ukuran efektivitas merupakan upaya pencapaian tujuan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat, yang mengalami impotensial - emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan adalah peningkatan potensi atau daya individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya dan bertumpuh pada kemampuan dan perkembangan pada individu dan masyarakat yang bersangkutan. Salah satunya program pemberdayaan nelayan merupakan program yang mengarahkan pada peningkatan pengetahuan baik teknis maupun non teknis bagi nelayan. Upaya pemberdayaan nelayan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Subang salah satunya yaitu Program Kartu Nelayan (Kusuka). Kartu Nelayan (Kusuka) adalah kartu identitas Nelayan yang dapat membuktikan identitas diri sebagai nelayan. Kartu Nelayan (Kusuka) merupakan syarat utama untuk nelayan dapat mengakses bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk nelayan. Program pemerintah tersebut antara lain Program Asuransi Nelayan, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan, pemberian BBM bersubsidi dan permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dinas Perikanan Kabupaten Subang akan menjembatani para nelayan dalam pembuatan kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan, dan asuransi nelayan secara gratis bagi para nelayan yang mengumpulkan persyaratan secara lengkap. Tetapi bagi para nelayan yang persyaratannya belum lengkap nelayan tersebut dianjurkan untuk membuat kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan dan asuransi nelayan sendiri. Hal tersebut dikarenakan Dinas Perikanan Kabupaten Subang telah mensosialisasikan tentang persyaratan yang diperlukan dalam

pembuatan kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan dan asuransi nelayan. Nelayan yang belum memiliki kartu nelayan secara aspek hukum belum dianggap sebagai pelaku usaha perikanan. Sertifikat hak atas tanah nelayan bertujuan untuk kelayakan pelaku usaha perikanan dan juga sebagai pinjaman permodalan untuk para nelayan yang membutuhkan modal bisa mengajukan kepada Koperasi dan juga Bank.

Dengan demikian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang harus benar-benar melihat persoalan yang terjadi dilapangan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan melalui program pemberdayaan nelayan. Selain itu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam Negara Republik Indonesia, Bab III pasal 12 menyatakan bahwa strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan. Dari pernyataan tersebut bahwa program pemberdayaan melalui sosialisasi tentang kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah nelayan, dan asuransi nelayan terdapat dalam poin pemberian ilmu pengetahuan teknologi dan informasi harus direalisasikan dengan baik dan benar kepada para nelayan agar program pemberdayaan tersebut berhasil. Kementerian kelautan dan perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya kartu nelayan atau kartu Kusuka. Dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan No 39 tahun 2017 tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan kartu nelayan atau kartu kusuka. Kartu nelayan atau (Kartu Kusuka) berfungsi sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pelayanan dan pembinaan pelaku usaha, dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian. Dalam menjalankan program pemberdayaan nelayan, nelayan juga diberi bantuan fasilitas lain berupa bantuan-bantuan yang berbentuk jaring untuk menangkap ikan dan kapal yang bertujuan membantu meningkatkan produktivitas nelayan untuk mencari ikan dengan daya jelajah lebih luas disesuaikan dengan kemampuan nelayan dalam pengoperasionalnya dan kemampuan permodalan. Pada kenyataannya saat ini fenomena yang terjadi adalah masih banyak nelayan yang belum memahami manfaat keuntungan dari kartu nelayan, asuransi nelayan dan sertifikat hak atas tanah nelayan. Banyak nelayan yang mendapatkan bantuan fasilitas tidak menggunakan fasilitas itu dengan maksimal. Banyak nelayan yang belum merasakan arti penting dari fasilitas yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Subang.

Program pemberdayaan nelayan melalui sosialisasi bertujuan agar nelayan menjadi tahu hak dan kewajibannya menjadi seorang nelayan. Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan tetapi masih terdapat nelayan yang belum menerima bantuan, serta nelayan berkewajiban memiliki kartu nelayan dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Pada kenyataannya masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tidak ramah

lingkungan. Di daerah pesisir Kabupaten Subang tempatnya di Blanakan banyak sekali aktivitas nelayan yang dijadikan untuk mencari nafkah seperti memancing atau mendapatkan ikan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Pemberdayaan nelayan ternyata belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut : masih terdapat 65% nelayan belum memahami hak dan kewajiban sebagai nelayan, kesadaran yang rendah dari nelayan akan pentingnya program pemberdayaan nelayan. Ditemui pula data dari jumlah nelayan 1.687 hanya 955 yang menggunakan kartu nelayan.

### Kerangka Teori

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari sudut pandang (View Point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erta dengan efesiensi. Seperti yang dikemukakan Etzioni dalam bukunya "organisasi-organisasi modern yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran." Berdasarkan pendapat diatas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Efektivitas merupakan sebuah pencapaian tujuan yang tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari berbagai pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Selain itu, efektivitas yakni sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas yakni merupakan daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang diharapkan. Menurut pendapat Mahmudi (2015:86) mendefinisikan sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan."

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas dibawah ini:

Gambar 1  
Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: Mahmudi,2015:86

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Dari beberapa pendapat diatas, bahwa konsep efektivitas suatu konsep untuk mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhirnya adalah pencapaian tujuan. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi walaupun artinya berbeda, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif .

Sedangkan menurut Siagian (2008:20-21) Efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tepat pada waktunya. Menurut pendapat Markus Zahnd dalam bukunya "perancangan kota secara terpadu" mendefinisikan efektivitas dan efisiensi sebagai berikut: "Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya." (Zahnd,2006:200). Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas "efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya (Kurniawan, 2005:109)

Dari penjelasan diatas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak menentukan kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang maksimal. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat dalam buku "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen." Mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Handyaningrat:1994:16)

Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Menurut Campbell dalam Richard (2005) menyatakan bahwa adanya pengukuran efektivitas secara umum, yaitu :

1. Keberhasilan program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan.

2. Keberhasilan sasaran  
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan terhadap program  
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
4. Tingkat input dan output  
Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh  
Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Makmur (2015:6-8) mengemukakan dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain:

1. Ketepatan waktu  
Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Ketepatan perhitungan biaya  
Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.
3. Ketepatan dalam pengukuran  
Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.  
Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.
5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan definisi efektivitas dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan atau sasaran-sasaran suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga efektivitas ini berkaitan dengan hasil atau *output* dan *outcome*. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang telah diharapkan. Pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditunjukkan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.

### Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya (Price,1972:15).

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauhmana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)  
Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.
3. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)  
Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi.
4. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)  
Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

#### 1. Teori-teori dari Model Teori Efektivitas program

Beberapa ahli menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Teori-teori dari Model Teori Efektivitas program, **Aspek-aspek efektivitas** berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.
  - b. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.
  - c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.
  - d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.
- #### 2. Indikator Efektivitas Program

Prespektif tersebut dikembangkan oleh Smith (1997) ke dalam beberapa indikator yaitu :

- a. Keuangan diukur dengan indikator : Aliran Kas, Pertumbuhan penjualan
- b. Pelanggan diukur dengan indikator : penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman.
- c. Proses internal dengan indikator : peningkatan teknologi, produktivitas, biaya perunit
- d. Inovasi dengan indikator : waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon kebutuhan pasar, fokus terhadap produk baru.

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata "*daya*" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "*berdaya*" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, erdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana dikutip oleh Wasistiono (1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : "membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya." Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut "upaya memberi keberanian dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi." Pemberdayaan atau pemberdayaan (empowerment) berasal kata "Power" (Kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan sebagai proses. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan untuk atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Menurut Richard Caver dalam Syarif (2008:61-62) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah ketersediaan individu-individu dibawah situasi dan kondisi yang tepat untuk mengemban tanggungjawab pribadi untuk memperbaiki situasi dimana mereka berbeda. Selanjutnya, Menurut Steward dalam Syarif (2008:62) mengemukakan bahwa pemberdayaan menuntut lebih banyak kecakupan dan



sumberdaya manajerial yang menuntu digunakan seperangkat kecakapan baru yaitu membuat mampu, memperlancar , berkonsultasi dan bekerjasama.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan.

### **1. Tujuan Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya “perubahan”. Oleh karena itu, mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tegerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai atau norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan.

### **2. Manfaat Pemberdayaan**

Salah satu manfaat besar dari pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan kemampuan terpendam dalam setiap individu.

### **Metode Penelitian**

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah atau metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Menurut Sugiyono (2009:2) menyatakan bahwa: “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan wawancara, tetapi sebelum dilakukannya penelitian peneliti melakukan survei kepada dinas Perikanan untuk meminta data mengenai adanya program pemberdayaan nelayan dan juga jenis kegiatan apa saja yang terdapat di Dinas Perikanan Kabupaten Subang, di Kecamatan Blanakan khususnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya. Alasan memilih metode penelitian kualitatif penulis ingin memastikan kebenaran data yang ada dilapangan sehingga masalah yang diteliti akan lebih jelas. Menurut Lexy J. Moleong (2005:6) menjelaskan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Dinas Perikanan Kabupaten Subang adalah salah satu instansi pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Subang yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Subang. Di Kabupaten Subang pengelolaan perikanan dan kelautan telah digulirkan sejak tahun 1970. Hal itu seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 27/PD-DPRD/1973/tanggal 16 Februari 1973 tentang Pengelolaan Laut dan Perikanan Daerah. Sehingga di wilayah Subang (1970-1975) dibagi jadi 2 pengelolaan yaitu Jawatan Perikanan Laut dan Jawatan Perikanan Darat.

Pada tahun 1975-2000 dibentuk Dinas Perikanan Kabupaten DT. II Subang. Setelah terbitnya Perda Kabupaten Subang No 26 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Subang dan dilanjutkan dengan perubahan Perda Kabupaten Subang No 14 tahun 2002 tentang perubahan ke 2 Peraturan Daerah Kabupaten Subang pengelolaan perikanan dan kelautan di wilayah Kabupaten Subang menginduk di Dinas Peternak, Pertanian dan Perikanan.

Baru pada tahun 2008 hingga sekarang pengelolaan perikanan dan kelautan membentuk Dinas sendiri yang diberi nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang. Profil Dinas Perikanan harus mengacu pada renstra induk Pemerintahan Kabupaten Subang. Oleh karena itu, seyogyanya dalam pembentukan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang harus menyokong dalam menyukseskan visi misi pemerintahan Kabupaten Subang. Dinas Perikanan Kabupaten Subang terbentuk dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
4. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

Setiap instansi pemerintahan pasti memiliki tujuan dan cita-cita yang sering disebut dengan Visi, setiap instansi memiliki Visi yang berbeda-beda untuk masa yang akan datang dan Dinas Perikanan Kabupaten Subang memiliki Visi sebagai berikut “ Terwujudnya Pembangunan Perikanan yang Religius, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan serta Berkelanjutan yang Berbasis Gotong Royong.”

Untuk tercapainya suatu Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, maka Dinas Perikanan Kabupaten Subang perlu melaksanakan tahapan-tahapan yang disebut dengan Misi. Adapun Misi Dinas Perikanan Kabupaten Subang adalah :



1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perikanan yang produktif
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk perikanan
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya perikanan
5. Meningkatkan Penanggulangan dan pengendalian hama penyakit ikan
6. Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat

Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus di Kecamatan Blanakan). Salah satu upaya Dinas Perikanan Kabupaten Subang untuk memberdayakan nelayan adalah melalui program kartu nelayan. Kartu nelayan merupakan program pemerintah untuk membantu nelayan agar memiliki perlindungan secara tugas pokok dan fungsinya terkait dengan resiko keselamatan pekerjaan nelayan atau asuransi nelayan. Program ini pada dasarnya merupakan perlindungan untuk para nelayan dan nelayan secara legal sudah ikut serta dalam aturan atau ketentuan dari pemerintah yang memiliki dasar hukum.

Program kartu nelayan ini memberikan kesempatan kepada kelompok penerima bantuan di Kecamatan Blanakan untuk melaksanakan program yang telah pemerintah tentukan. Disamping itu Kelompok Usaha Bersama (KUB) diberikan kekuasaan untuk membina kelompok-kelompok nelayan kecil menjadi kelompok besar dalam arahan koperasi dengan bantuan pemerintah. Diharapkan nelayan secara bersama-sama bisa turut membantu program dan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam bentuk fisik atau non fisik seperti sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Dalam menjalankan Program Pemberdayaan Nelayan, nelayan juga diberi bantuan fasilitas lain berupa bantuan-bantuan yang berbentuk jaring untuk menangkap ikan dan kapal yang bertujuan membantu meningkatkan produktivitas nelayan untuk mencari ikan dengan daya jelajah lebih luas disesuaikan dengan kemampuan nelayan dalam pengoperasionalnya dan kemampuan permodalan. Selain itu bantuan secara non fisik berupa arahan dan pembinaan kepada para nelayan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan nelayan. Program kartu nelayan telah dilaksanakan di Kabupten Subang sejak tahun 2011 hingga 2018, dan pada tahun 2019 kartu nelayan akan diganti menjadi Kartu Kusuka. Pada tahun 2018 di Kecamatan Blanakan dari jumlah nelayan 1.687 nelayan hanya 955 yang mempunyai kartu nelayan. (Data Dinas Perikanan Kabupaten Subang tahun 2018). Dalam sub bab ini, penulis akan mendeskripsikan teori pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Sutrisno (2010:125-126) dengan memperhatikan lima variabel yang menjadi pengukur terhadap keberhasilan suatu program. Lima variabel tersebut meliputi: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata.

### **Pemahaman Program**

Disini akan dilihat apakah dari sisi pemahaman program, Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang sudah berjalan efektif atau tidak efektif. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara



memahami. Pemahaman mencakup tujuan, tingkah laku atau tanggapan yang mencerminkan sesuatu pemahaman yang termuat dalam suatu komunikasi. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pengukur pertama untuk melihat suatu program berjalan efektif atau tidaknya, dilihat dari pemahaman para penerima sasaran program tersebut. Mengacu pada pernyataan diatas maka pemahaman program dapat diartikan untuk melihat sejauhmana pemahaman dari masyarakat penerima sasaran tersebut.

Pemahaman Program dalam konteks skripsi ini yaitu untuk mengetahui sejauhmana masyarakat nelayan dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang adalah berikut hasil wawancara penulis dengan Kasie Pemberdayaan Nelayan mengatakan : "Mengenai rencana dalam rangka pemberdayaan terhadap nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Subang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada para nelayan. Pembinaan tersebut berbentuk penyuluhan dan pelatihan, pelatihan untuk nelayan yang diadakan setiap satu tahun. Metode pembinaannya dengan cara diskusi, temu wicara yang dilaksanakan oleh kami Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Selain itu, secara tupoksinya program pemberdayaan nelayan itu terkait dengan perlindungan resiko pekerjaan nelayan diadakan asuransi nelayan yang sifatnya bantuan dari pemerintah dan juga ada yang mandiri. Awalnya asuransi itu diberikan satu kali oleh pemerintah kemudian mereka untuk melanjutkannya secara mandiri. Selain itu, pemberdayaan dari pemerintah itu melalui bantuan alat tangkap dan berupa sarana prasarana." (Wawancara, 28 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambar dari aspek rencana telah dilakukan, hanya saja belum semua nelayan yang mengetahui rencana yang telah dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Perlu diketahui oleh nelayan agar tujuan dari rencana tersebut bisa tercapai. Terkait hal tersebut peneliti menanyakan kepada salah satu nelayan yang ada di Kecamatan Blanakan. "untuk rencana program dari Dinas perikanan saya sudah mendengar beberapa rencana-rencana program pemberdayaan nelayan yang bertujuan untuk memberdayakan nelayan. Saya mengetahui rencana tersebut dari diskusi bersama kepala koperasi yang lebih sering menemui petugas Dinas Perikanan Kabupaten Subang." (Wawancara, 07 Desember 2019). Terkait dengan rencana-rencana yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Subang diperlukan adanya sosialisasi kepada nelayan agar para nelayan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai nelayan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pemberdayaan Nelayan mengatakan: "Untuk sosialisasi kami mengadakan pertemuan dengan nelayan setiap satu bulan sekali dan sebagian besar nelayan mengetahui tentang program pemberdayaan nelayan tetapi tidak semua nelayan mengerti atau paham akan hak dan kewajibannya sebagai nelayan. masih terdapat nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan, padahal kartu nelayan tersebut sebagai kartu identitas diri sebagai nelayan dan syarat utama untuk dapat mengakses program yang dikeluarkan oleh pemerintah." (Wawancara, 28 November 2019).



Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari aspek sosialisasi telah dilakukan hanya saja belum semua nelayan yang memahami hak dan kewajibannya sebagai nelayan. Dan juga belum semua para nelayan memiliki kartu nelayan hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran dari nelayan itu sendiri. Begitupun dengan kartu asuransi nelayan masih ada sebagian nelayan yang menganggap bahwa kartu nelayan dan kartu asuransi itu tidak begitu penting. Untuk pemahaman nelayan masih terdapat hak dan kewajibannya belum bisa berjalan dengan baik padahal nelayan sudah menerima haknya tetapi nelayan belum bisa menjalankan kewajibannya. Jika dikaitkan dengan teori pernyataan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dimensi pemahaman program sudah dilaksanakan tapi belum maksimal. Kemudian berikut adalah hasil wawancara dengan staf pelaksana program pemberdayaan nelayan : “Untuk pemahaman nelayan terhadap program pemberdayaan nelayan belum memahami, masih terdapat nelayan yang tidak menjalankan kewajibannya. Mereka sudah menerima bantuan alat tangkap dari pemerintah yang ramah lingkungan tetapi nelayan masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi setiap satu bulan sekali dan mengingatkan mereka untuk menggunakan alat yang ramah lingkungan. Dari jumlah nelayan 82% masih terdapat 65% nelayan yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai nelayan.” (Wawancara 28 November 2019). Kemudian berikut adalah hasil wawancara dengan ketua KUD di Kecamatan Blanakan: “untuk pemahaman program pemberdayaan itu kan mengumpulkan nelayan itu supaya ada sesuatu yang berkesinambungan. Misalkan kita pada pemberdayaan nelayan, nelayan itu bukan kita manfaatkan tapi kita ambil dari potensinya, fungsinya sama berkelanjutannya supaya nelayan ini tetap ada. Nelayan tetap eksis dengan mata pencahariannya maka dilakukan pemberdayaan. Pemberdayaannya kalau di kita nelayan itu programnya sebenarnya banyak dari pemerintah, ada berbagai macam bantuan dan dari kita juga pemberdayaan dari koperasinya itu sama juga sih cuma kita dengan perhatian khusus pemberdayaannya. Kalau dari pemerintah memang jelas pemberdayaann dari pemerintah itu melalui bantuan alat tangkap, berupa sarana yang pemerintah bantu. Namun, ketika pemerintah memberikan bantuan kepada kita nelayan itu dirasa oleh kita itu dilematis. Jelas dilematis karena bantuan dari pemerintah itu disoroti. Jadi mereka menyoroti kita apakah bantuan diterima oleh nelayan atau tidak. Bukan hanya itu saja, ketika bantuan itu kita terima tetapi tidak sesuai dengan kearifan lokal kita.” (Wawancara, 07 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari aspek pemahaman telah dilakukan hanya saja belum semua nelayan yang memahami hak dan kewajibannya sebagai nelayan. Berdasarkan pemaparan diatas yang dikemukakan oleh staf pelaksana bahwa masih terdapat nelayan yang sudah menerima haknya yaitu mendapatkan alat tangkap yang ramah lingkungan tetapi tidak menjalankan kewajibannya untuk menggunakan alat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan 82% masih terdapat yang tidak memahami hak dan kewajibannya yaitu sebanyak 65% nelayan.

Pengukur pertama untuk melihat suatu program berjalan efektif atau tidaknya dilihat dari pemahaman penerima sasaran program tersebut. Mengacu pada pendapat Sutrisno maka pemahaman program dapat diartikan untuk melihat sejauh mana pemahaman dari masyarakat penerima sasaran tersebut. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif, hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari nelayan akan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajibannya, kurang menjalankan kewajibannya dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari masing-masing nelayan. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan informasi atau dalam mensosialisasikan terkait dengan Program Pemberdayaan Nelayan kepada para nelayan, agar nelayan dapat memahami Program Pemberdayaan Nelayan dan menjalankan kewajibannya. Agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan bisa berjalan dengan efektif.

### **Tepat Sasaran**

Tepat sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Program dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya atau tepat sasaran yaitu bagaimana suatu program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran dan sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran Program Pemberdayaan yaitu Nelayan, tepat sasaran yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah dalam mengambil keputusan, terlebih dalam memberi bantuan yang pada dasarnya adalah dibutuhkan oleh nelayan. Upaya untuk memberdayakan nelayan salah satunya dengan kartu nelayan, asuransi nelayan, bantuan berupa alat tangkap. Bantuan yang diberikan pada pelaksanaannya belum merata. Berikut ini merupakan petikan wawancara dengan kasie Pemberdayaan Nelayan yaitu sebagai berikut: "Kami telah memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan pemerintah, tetapi kami sulit untuk merealisasikan bantuan tersebut karena masih terdapat nelayan yang belum memiliki kartu nelayan. Dari jumlah nelayan 2.714 hanya 1.565 yang memiliki kartu nelayan. Bagi yang tidak memiliki kartu nelayan tidak akan terdaftar sebagai penerima bantuan. Untuk bantuan Kami sudah merealisasikan kepada nelayan yang telah memiliki kartu nelayan, adapun bagi nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan kami sudah berusaha mengingatkan agar mereka membuat kartu nelayan." (Wawancara, 28 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambar dari aspek tepat sasaran telah dilakukan, hanya saja dalam pelaksanaan program pemberdayaan nelayan masih ada ketidaktepatan sasaran hal ini dapat dilihat dari bantuan yang diberikan pemerintah belum merata ke semua nelayan. Berikut dibawah ini merupakan petikan wawancara dengan KUD Kecamatan Blanakan: "Untuk ketepatan sasaran belum bisa berjalan dengan baik, karena bantuan yang diberikan pemerintah untuk nelayan belum memadai dengan jumlah nelayan yang cukup banyak sehingga kami sebagai pengelola belum bisa memberikan bantuan yang merata kepada para nelayan. Kami hanya bisa memberikan bantuan kepada nelayan yang memiliki kartu nelayan. Belum semua nelayan menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah dengan semestinya." (Wawancara, 07 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambar dari aspek tepat sasaran telah dilakukan hanya saja belum semua nelayan menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan sasaran, sejauhmana sasaran yang telah ditentukan bisa tercapai. Mengacu pada pendapat Sutrisno maka untuk ketepatan sasaran. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif, hal tersebut terjadi karena masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan untuk nelayan. Pemerintah harus lebih tegas terhadap nelayan agar mereka memiliki kartu identitas diri sebagai nelayan dan bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan bisa berjalan dengan efektif.

### **Tepat Waktu**

Tepat yaitu tidak ada selisih waktu sedikitpun, tepat juga berarti tidak kurang dan tidak lebih. Tepat waktu dalam suatu organisasi atau dalam suatu program yaitu penggunaan waktu dalam pelaksanaan organisasi atau program harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan sebelumnya dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan ini dapat dikatakan tepat waktu atau tidaknya dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses pelaksanaan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat berbagai kendala yang terjadi akan dapat menghambat pelaksanaan program yang akan diberikan kepada para nelayan. Terkait dengan pemberian bantuan yang diberikan seperti alat tangkap dan bantuan lainnya harus diberikan tepat waktu agar pelaksanaan program bantuan alat tangkap, kartu nelayan dan yang lainnya dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dan harapan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pemberdayaan Nelayan mengenai tepat waktu dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang: "Untuk bantuan program pemberdayaan nelayan yang diberikan oleh pusat belum bisa disalurkan tepat waktu karena bantuan yang diberikan dari Pusat ke Dinas terkadang lambat. Sehingga kami menyalurkan kepada nelayan sedikit terhambat. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh Dinas kepada nelayan semaksimal mungkin diberikan tepat pada waktunya. Dan untuk sosialisasi kami selalu mengadakan sesuai dengan jadwal pertemuan sosialisasi yaitu setiap satu bulan sekali." (Wawancara, 28 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambar dari aspek tepat waktu telah dilakukan hanya saja bantuan belum tersalurkan tepat waktu. Dan untuk sosialisasi selalu dilaksanakan sesuai dengan jadwal sosialisasi. Berikut merupakan petikan wawancara dengan KUD Kecamatan Blanakan: "Untuk pembagian bantuan pemberdayaan nelayan belum diberikan tepat waktu karena bantuan dari pusat ke Dinas lambat dan proses dari Dinas ke KUD pun cukup lama. Jadwal untuk sosialisasi pemberdayaan nelayan tidak menentu, terkadang tergantung pihak Dinas yang mengadakan sosialisasi ke para nelayan sehingga nelayan tidak ada ditempat dan tidak mengikuti sosialisasi karena jadwal tidak menentu." (Wawancara, 07 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari aspek tepat waktu telah dilakukan hanya saja bantuan yang diberikan Dinas belum tepat waktu. Karena prosesnya yang cukup lama serta untuk sosialisasi jadwalnya belum menentu sehingga masih terdapat nelayan yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Berikut petikan wawancara dengan nelayan di Kecamatan Blanakan yaitu sebagai berikut: "Bantuan program pemberdayaan nelayan yang diberikan oleh pemerintah belum tepat waktu. Terkadang bantuannya lambat dan terkadang cepat. Jadwal kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas tidak menentu. Terkadang ada beberapa nelayan tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena sedang menangkap ikan dan mengakibatkan para nelayan tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh Dinas." (Wawancara, 07 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari aspek tepat waktu telah dilakukan hanya saja pemerintah belum bisa memberikan bantuan secara tepat waktu, serta jadwal kegiatan sosialisasi yang tidak menentu. Untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan waktu. Mengacu pada pendapat Sutrisno maka untuk ketepatan waktu. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif, hal tersebut terjadi karena bantuan yang diberikan pemerintah kepada nelayan belum diberikan tepat waktu dan untuk jadwal sosialisasi yang diadakan oleh Dinas belum sesuai dengan jadwal sosialisasi.

### **Tercapainya Tujuan**

Dalam suatu organisasi atau suatu program, tentunya sangat mengharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar tujuannya tercapai diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu ketepatan waktu serta sasaran yang merupakan target kongkrit, tujuan utama program pemberdayaan nelayan yaitu untuk mensejahterakan nelayan melalui program yang diberikan oleh pemerintah dan Dinas perikanan Kabupaten Subang seperti program pemberdayaan nelayan seperti program kartu nelayan, program bantuan alat tangkap, program asuransi dan lain-lain, tujuan lainnya yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan para nelayan, menciptakan perubahan dalam kehidupan nelayan dan kesejahteraan sosial para nelayan. Dari tujuan tersebut diharapkan program dapat tercapai agar program pemberdayaan nelayan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Nelayan mengungkapkan bahwa: "Tujuan dari program pemberdayaan nelayan belum berjalan efektif karena kurangnya pemahaman dari para penerima sasaran, masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta bantuan yang diberikan pemerintah belum merata dan bantuan yang diberikan belum tepat waktu, masih ada beberapa nelayan yang tidak bisa mengikuti kegiatan sosialisasi". (Wawancara, 28 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari



aspek tercapainya tujuan telah dilakukan, hanya saja masih terdapat nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya serta masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan bantuan yang diberikan Dinas kepada nelayan belum tepat waktu. Serta sosialisasi belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan dibawah ini merupakan petikan wawancara dengan KUD sebagai berikut: "Tujuan program pemberdayaan nelayan belum tercapai, para pengelola program sudah berusaha agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa kendala kurangnya kesadaran para nelayan terhadap pentingnya program pemberdayaan nelayan. Sebagian besar para nelayan sudah menerima hak sebagai nelayan tetapi belum bisa menjalankan kewajibannya." (Wawancara, 28 November 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambarkan dari aspek tercapainya tujuan telah dilakukan hanya saja masih kurangnya kesadaran dari para nelayan terhadap pentingnya program pemberdayaan nelayan. Untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari tercapainya tujuan. Mengacu pada pendapat Sutrisno maka untuk tercapainya tujuan. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif, hal tersebut terjadi karena masih terdapat nelayan yang memahami hak dan kewajibannya serta belum semua nelayan memiliki kartu nelayan dan bantuan yang diberikan pemerintah belum tepat waktu serta jadwal sosialisasi yang tidak menentu.

### **Perubahan Nyata**

Perubahan adalah hal yang diharapkan dalam suatu program, perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Perubahan merupakan merupakan hal yang cukup sulit dalam suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran. Perubahan nyata yaitu diukur melalui sejauhmana tingkat keberhasilan efektivitas program Pemberdayaan Nelayan untuk mewujudkan perubahan. Pemerintah mengharapkan dari pelaksanaan program tersebut dapat terjadi perubahan dari segi keefektifan program yang diberikan, kesejahteraan nelayan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Kasie Pemberdayaan Nelayan yaitu sebagai berikut: "Untuk Program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Blanakan sudah ada perubahan, yang awalnya semua nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan tetapi setelah menerima bantuan dari pemerintah sekarang sudah mulai ada para nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan." (Wawancara, 28 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sudah ada perubahan dari nelayan penerima bantuan program pemberdayaan nelayan dari segi alat tangkap. berikut adalah petikan wawancara dengan KUD kecamatan Blanakan yaitu sebagai berikut: "Di kecamatan Blanakan untuk tahun 2018-2019 ada perubahan terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tetapi belum semua nelayan menggunakannya karena masih kurangnya kesadaran dari masing-masing nelayan dan kurangnya pengetahuan nelayan dalam mengakses bantuan program pemberdayaan nelayan." (Wawancara, 07 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam prakteknya Efektivitas Program Pemberdayaan di Dinas Perikanan Kabupaten Subang tergambar dari aspek perubahan nyata telah dilakukan dan sudah mulai ada perubahan dari para nelayan. Untuk mengukur efektivitas program dapat dilihat dari perubahan nyata. Mengacu pada pendapat Sutrisno maka untuk perubahan nyata. Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang sudah dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari perubahan dari para nelayan. Yang berawal dari sebelumnya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sekarang beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Program dalam konteks ini belum berjalan efektif, Dinas Perikanan Kabupaten Subang sudah melaksanakan sosialisasi agar nelayan paham terhadap program Pemberdayaan Nelayan tetapi masih terdapat nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta masih terdapat nelayan yang tidak memiliki identitas diri sebagai nelayan. (65% belum memahami hak dan kewajibannya)
2. Tepat sasaran dalam konteks ini belum berjalan efektif, Dinas Perikanan Kabupaten Subang sudah memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan sasaran. Tetapi belum semua nelayan menerima bantuan, karena masih ada sebagian nelayan yang tidak memiliki kartu nelayan.
3. Tepat Waktu dalam konteks ini belum berjalan efektif, Pemerintah sudah memberikan bantuan kepada nelayan tetapi bantuan tersebut belum diberikan tepat waktu serta sosialisasi program pemberdayaan nelayan belum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Tercapainya Tujuan dalam konteks ini belum berjalan efektif, Karena masih kurangnya kesadaran nelayan akan pentingnya program pemberdayaan nelayan serta nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya dan manfaat dari kartu nelayan.
5. Perubahan Nyata dalam konteks ini sudah berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari nelayan yang sebelumnya tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, beralih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

### Referensi

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga
- Azwar, S. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sigma Alfa.
- Bagong, Suyanto. Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka



- Effendi Sofian, (2015). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Gibson , Ivancevich, Donnely, (1997). *Organisasi dan Manajemen Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmudi, 2010. *Efektivitas Organisasi*. Edisi kedua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refliks Aditama.
- Moekijat, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV, Mandar Maju: Bandung
- Nursid Sumaatmadja, 2006, *Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*, Bandung: Alumni.
- P.Joko Subagyo. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2017 tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga
- Robbins, Stephen P. (1994). *Teori Organisasi Konsep, Struktur, Proses*. Jakarta: Arcan.
- Silalahi, Uber. 2011. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Reflika Aditama.
- Sondang P. Siagian, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta
- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. 1990, hal 15.
- Sugiyono, (2015) *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Streest Richarrd, M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Tjokromidjojo, Bintaro. 2001. *Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Haji Masagung
- Torang, Syamir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan petambak garam.
- Winardi, 2011. *Teori Organisasi dan pengorganisasian*. Divisi Buku Perguruan Tinggi
- Wijaya, Amin Tunggul. (1993). *Manajemen Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama Jakarta : Rineka Cipta Jaya